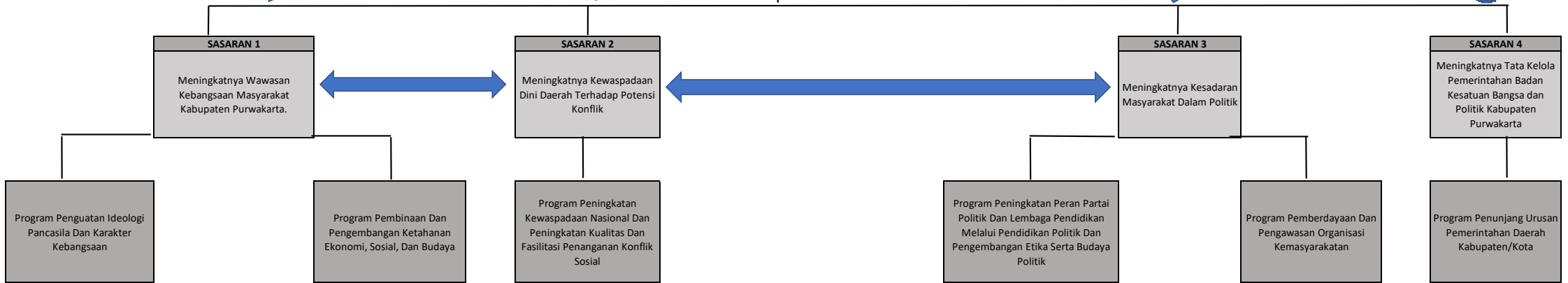


**CROSS CUTTING  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PURWAKARTA**

STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
2. Meningkatkan Sinergritas dan solideritas dalam penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
3. Reformasi Birokrasi, Meningkatkan Capaian Akuntabilitas Perangkat Daerah
4. Meningkatkan solideritas dan sinergritas dalam penanganan ketertiban dan kerukunan masyarakat
5. Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila



**SASARAN 1**  
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.

**SASARAN 2**  
Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik

**SASARAN 3**  
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Politik

**SASARAN 4**  
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

CROSSCUTTING
1. Keterkaitan Sasaran 4 terintegrasi ke semua program yang bertanggung jawab sebagai pendukung kebutuhan berjalannya program kegiatan
2. Keterkaitan Sasaran 2 Memiliki pengaruh dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang ada pada Sasaran 1 dan 3